

**KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT
S.M. KARTOSOEWIRJO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KHOZIN

99373883

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN, SW, M. Ag.**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2004

ABSTRAK

Judul : Konsep Negara Islam Menurut S.M. Kartosoewirjo
Penulis : Khozin
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun : 2004
NIM : 99373883

Penelitian yang berjudul “Konsep Negara Islam Menurut S.M. Kartosuwirjo” ini bertujuan untuk menjelaskan secara akurat bagaimana konsep Negara Islam menurut S.M. Kartosoewirjo, serta untuk menjelaskan factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran S.M. Kartosoewirjo sehingga dia mendirikan Negara Islam Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research, yang bersifat deskriptif analitik yaitu dengan mendeskripsikan sifat-sifat tokoh tersebut serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tokoh tersebut yang mempengaruhi pemikirannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, yaitu data yang ditulis oleh tokoh itu sendiri dan data sekunder yang ditulis oleh orang lain. Adapun dalam menganalisa data, penelitian menggunakan metode kualitatif analisis-deduktif, dengan menggunakan pendekatan normative dan sosio-historis. Yaitu bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio politik yang mengitarinya. Dengan demikian pengaruh social politik terhadap pemikiran S.M. Kartosoewirjo juga ditelaah, sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikirannya. Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Negara Islam dalam gambaran S.M. Kartosoewirjo adalah suatu Negara yang semata-mata bersendikan kepada perintah-perintah Allah yang termasuk di dalamnya hadis-hadis yang shahih dan undang-undang serta peraturan-peraturan Negara yang dikeluarkan oleh Ulil Amri Islam. menurutnya suatu Negara Islam harus memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh secara de facto maupun de jure. Teodemokrasi adalah bentuk Negara dan system pemerintahan yang ideal menurut S.M. Kartosoewirjo. Dalam merealisasikan ide Negara Islamnya Kartosoewirjo agaknya tidak bisa menemukan strategi yang ideal, karena sifatnya radikal, formalis dan tidak realistic bahkan cenderung anarkhis, sehingga tujuan Negara Islam Indonesia sebagai karunia Illahi di bumi hilang karena tidak dilaksanakan dengan damai. 2) menilik latar belakang S.M. Kartosoewirjo dalam mendirikan NII, ada dua factor yang melatarbelakanginya dalam memproklamirkan NII yaitu factor intern dan ekstern. Factor intern tersebut adalah bahwa ide NII merupakan cerminan dari keyakinan beliau terhadap ajaran-ajaran Islam atau merupakan cerminan yang diilhami ajaran-ajaran Islam. Selain itu juga merupakan sikap cita-cita yang diilhami ajaran-ajaran Islam, selain itu juga merupakan sikap komitmen dan semangatnya yang tinggi untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, serta bentuk ijtihad dari apa yang telah ia pelajari dan warisi tentang agama Islam dari para gurunya yang menganjurkan Negara Islam. Yang membentuk kepribadiannya menjadi mujahid yang istiqomah. Selain itu juga ambisinya yang ingin menjadi pemimpin. Factor ekstern tersebut di antaranya adalah pencoretan naskah Piagam Jakarta, dalam pembukaan UUD tanggal 18 Agustus 1945, adanya perjanjian Renville (1948), yang berakibat hijrahnya kekuatan militer (TNI) ke Yogyakarta yang waktu itu menjadi Ibu Kota Negara.

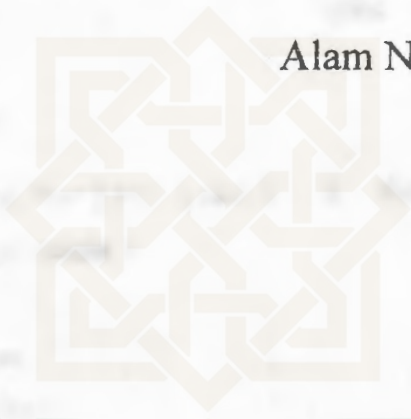
Keyword: Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewirjo

Motto

إن مع العسر يسرا

"*sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*"

Alam Nasyrah (1911)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Khozin

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sesudah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Khozin

NIM : 99373883

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **Konsep Negara Islam Menurut S.M. Kartosoewirjo**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan berharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Shafar 1426 H
29 Maret 2004 M

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP : 150222295

Dra. Ocktoherrinsyah M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Khozin

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu alaikum wr. wb.

Sesudah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Khozin
NIM : 99373883
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : Konsep Negara Islam Menurut S.M. Kartosoewirjo

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan berharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Shafar 1426 H
29 Maret 2004 M

Pembimbing II

Drs. Ocktoherrinsyah M. Ag.
NIP : 150289435

Dr. Ocktoferrinsyah M. Ag.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

PENGESAHAN

NOTA DIN'S

Skripsi berjudul

Did : Skripsi Tesis ke Khazim

"Konsep Negara Islam Menurut S.M. Kartosoewirjo"

yang disusun oleh

KOZIN

NIM:99373883

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 02 Juni 2004M/13 Jumadil Ula H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

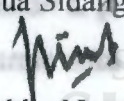
ma'na memuat : kar : skripsi/tesis ke

Jogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1425 H
20 Juni 2004 M

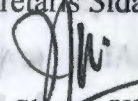
Dekan Fakultas Syariah


Drs. H.A. Malik Madany, MA
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang


Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150 246 195

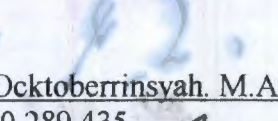
Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag.
NIP: 150 222 295

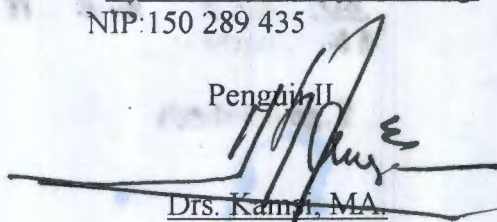
Pembimbing II


Drs. Ocktoferrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Penguji I


Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag
NIP: 150 222 295

Penguji II


Drs. Kamari, MA.
NIP: 150 231 514

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ يَا لَهْدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur tiada terhingga penyusun haturkan kepada Allah swt, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana starata satu di IAIN Sunan Kalijaga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sepanjang masa.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karenanya wajib bagi penulis untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa
3. Bapak Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun.
4. Segenap Dosen-dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

5. Kedua orang tua penyusun dan keluarga yang selalu mendoakan dan telah memberikan dorongan moril dan materiil
6. Buat para sahabat-sahabat yang berkenan meluangkan segenap waktu, tenaga, dan pikiran untuk berdiskusi dan belajar bersama penulis. Serta berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu di sini.

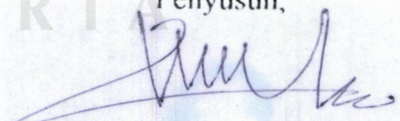
Meskipun penyusun telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi. Penyusun menyadari keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini, sehingga saran dan kritik selalu ditunggu

Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. Kami memohon, semoga dengan bimbingan dan taufiq dan hidayahnya, kami mampu memperoleh ilmu yang bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, 29 January 2004 M
7 Dzulhijjah 1424 H

Penyusun,



Khozin
99373883

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	zai	Z	-
12.	س	sin	S	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	Ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fathah dan Ya'	ai	-
2.	و	Fathah dan Waw	au	-

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *maudū'* غير : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	آ	Fathah dan Alif Layyinah	A	a bergaris atas
3.	إ	Kasrah dan Ya'	i	i bergaris atas
4.	أ	Dammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

تَحِبُّونَ : *tuhibbūna* الإنسان : *al-insān*

C. Ta' *al-Marbutah*

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرحمة : *al-rahmah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muḥammad*

الوَدَّ : *al-wudd*

E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣāni*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti:

عبد الرحمن bias ditulis *Abdurrahmān* atau *Abd al-Rahmān*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : PEMIKIRAN KENEGARAAN DALAM ISLAM	19
A. Pengertian Negara	19
1. Istilah dan Asal-Usul Negara dalam Islam.....	20
2. Unsur-Unsur Negara.....	29
B. Kedudukan Negara dalam Islam	33 ✓
C. Tipologi Negara dalam Islam	38
1. Tipe Negara Menurut Barat	38
2. Tipe Negara Menurut Islam	47
3. Negara dalam Teori Modern	54
D. Prinsip-Prinsip Dasar Negara Dalam Islam	59

BAB III : POKOK-POKOK PIKIRAN POLITIK

S.M.KARTOSOEWIRJO	63
A.Riwayat Hidup dan Kondisi Lingkungan Sosial Budaya	63
1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan.....	63
2. Karir Politik	69
B. Pemikiran Politik S.M. Kartosoewirjo	77
1. Faktor-Faktor yang Melatar-Belakangi Lahirnya NII	77
2. Relasi Agama dan Negara	81
3. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan	89
4. Unsur-Unsur Negara	94
BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN POLITIKS.M.KARTOSOEWIRJO ...	99
A. Faktor-Faktor yang Melatar-Belakangi Pemikirannya	99
B. Hubungan Antara Agama dan Negara	105
C. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan	116
D. Unsur-Unsur Negara	123
BAB V. PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran-Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
11. Biografi Ulama	II
111. Curriculum Vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Agama Islam bukanlah suatu agama yang hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, tetapi juga merupakan sistem kemasyarakatan, sehingga ia lebih tepat disebut sebagai *way of life* bagi pemeluknya. Namun dalam pengungkapan ajaran-ajaran itu terdapat perbedaan antara persoalan *teologis* dan *ubūdiyah* dengan persoalan kemasyarakatan. Yang pertama bersifat detail sedangkan yang kedua pada umumnya hanya berbentuk garis besar atau prinsip-prinsip umum saja. Hal ini dimaksudkan agar ajaran-ajaran Islam itu akan selalu relevan dengan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis.

Dalam al-Qur'an maupun Hadits memang tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensil atau parlementer. Demikian juga, bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah terdapat keharusan memisahkan (*separation of power*), pembagian (*distribution of power*) atau penyatuan kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang jelas ketiga kekuasaan ini terdapat dalam praktek Rasulullah dan al-Qur'an.¹

Sementara itu sebagian ilmuwan dan ulama' Islam berpendapat tentang hubungan sistem ketatanegaraan dengan Islam bahwasanya pada kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan sebuah sistem kenegaraan yang Islami karena bagaimanapun juga untuk mengamankan suatu kebijaksanaan yang berdasarkan

¹ Masykuri Abdillah, "Reorientasi Pembelajaran Fiqh Siyasa Menuju Artikulasi Hukum dan Politik Kontemporer", Makalah disampaikan pada seminar nasional HMJ PMH-MU Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 23 September 1999, di Gedung Aula I IAIN Sunan Kalijaga

tuntunan Islam pasti memerlukan kekuatan untuk menegakan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban yang Islami juga tidak diragukan lagi sangat memerlukan organisasi politik (negara).²

Sebenarnya dalam hubungannya dengan politik, Islam tidak hanya menjadi semangat tetapi lebih dari itu Islam juga telah menjadi ideologi bagi umatnya. Ini merupakan konsekwensi dari adanya keyakinan dari umat Islam, bahwa Islam adalah aturan yang lengkap dan komprehensif yang mencakup seluruh kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan,³ didukung pula oleh adanya doktrin keharusan dalam menegakan hukum-hukum Tuhan di muka bumi. Hal inilah yang menjadikan motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk selalu berusaha mengambil peran dalam percaturan politik dalam suatu negara.

Negara Islam adalah sebuah wujud kehidupan yang menjadi cita-cita banyak ideolog Muslim di mana pun di dunia ini. Namun upaya perwujudannya selalu mengalami kegagalan. Sekiranya demokrasi memihak pada Islam, jumlah pemberontakan yang pernah muncul dan disertai dengan banyaknya jumlah korban, dapatlah menjadi statistik betapa banyak orang yang menginginkan tegaknya kerajaan *Ilahi Rabbi* di bumi ini.

Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, posisi Islam dan negara senantiasa berada pada kutub-kutub pemikiran dan dalam aksi politik yang saling tarik menarik. Sebagai doktrin, Islam diyakini mengatur seluruh persoalan

² Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Study Tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet 1 (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm.6.

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara*, alih bahasa Syafri Halim, cet 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 18-19.

kehidupan dari persoalan spesifik personal hingga ke konsepsi kehidupan kenegaraan. Pemikiran untuk mewujudkan Negara Islam di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya muslim sangat mempengaruhi para pendiri negara atau para pejuang kemerdekaan yang tidak sudi berada di bawah kekuasaan non-muslim yang dianggap mewakili kekuasaan kolonial.⁴

Adapun yang menjadi dasar dan pendorong bagi pemimpin-pemimpin Islam dan alim ulama' dalam memasuki lapangan politik adalah adanya kenyataan bahwa dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang hidup kemasyarakatan, selain itu juga adanya keyakinan tentang wajibnya bagi masyarakat Islam diatur menurut hukum-hukum al-Qur'an tersebut. Hal tersebut pada akhirnya membawa pada suatu tujuan politik yaitu membentuk negara yang berdasarkan Islam, karena mereka berkeyakinan bahwa hukum-hukum al-Qur'an itu dapat dilaksanakan oleh pemerintahan yang berjiwa Islam, dan pemerintahan yang berjiwa Islam dapat dibentuk hanya dalam negara Islam. Pemikiran inilah yang membawa kepada suatu ide negara Islam.⁵

Di Nusantara sendiri, cahaya Islam telah ada sebelum penjajahan, pada waktu itu muncul kerajaan-kerajaan Islam dari Malaka sampai Maluku: Samudera Pasai Aceh Darussalam, Tumasik, Malaka, Asahan, Minangkabau, Palembang, Jambi, Kerajaan Demak, Mataram, Cirebon, Banten, Jayakarta, Bugis, Makasar, Antasari, Goa, Ternate, dll. Selama delapan abad cahaya Islam begitu indah menerangi nusantara, hingga diredupkan oleh kedatangan penjajah pada abad ke-

⁴ Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam, Studi Harakah Darul Islam dan MNLJ* (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. vii

⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, cet. VI (Bandung: Mizan, 2000), hlm 232-234

16 M. Sejak saat itu nilai ajaran-ajaran Islam terputus dari masyarakat muslim untuk berperan sebagai pengambil kebijakan, kekuasaan, dan penyulut cahaya gemilang peradaban manusia di bumi. Hingga kini peran dominan hegemoni Barat semakin besar di dunia, ajaran-ajaran Islam dipahami semakin sempit dan menjadi benda-benda tua arkeologi jaman kejayaan Islam yang tidak terurus, menyepi kepedalaman menjadi saksi bisu kejayaan yang pernah ada. Di sisi lain penjajahan Barat melahirkan fenomena baru di lingkungan kaum terpelajar penduduk pribumi oleh munculnya paham nasionalisme sekuler melanda negeri-negeri masyarakat muslim di abad ke-14 Hijriyah.⁶

Adapun pemikiran tentang konsep kenegaraan dalam Islam, terutama di Indonesia belum begitu jauh berkembang, namun indikasi ke arah itu telah mulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada permulaan abad ke 20 M, seiring dengan tumbuh dan bangkitnya kesadaran kaum muslimin terhadap ajaran agamanya setelah diam dan tenggelam lebih seribu tahun lamanya, cita-cita negara Islam muncul kembali ketengah-tengah masyarakat dunia,⁷ sehingga muncul beberapa tokoh muslim yang secara intens memperjuangkan Islam sebagai landasan bagi segala aspek kehidupan termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara (berpolitik).

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pada zaman kolonial Belanda, pemerintahannya bukanlah Islam yang tidak dapat diharapkan berlakunya hukum-hukum Islam. Pada waktu itu para pemimpin Islam

⁶ Al Chaidar, *Sepak Terjang KW Abu Toto menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosoewirjo*, cet III (Jakarta: Madani Press, 2000), hlm. 2.

⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, diedit oleh Harun al-Barbasy, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Iqra'. 2001), hlm. 2.

berkeyakinan kalau Indonesia telah merdeka maka hukum-hukum Islam akan berlaku dan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tentu akan membentuk negara Indonesia merdeka yang berdasarkan Islam dan pemerintahannya berjiwa Islam. Oleh karena itu yang dipentingkan para pemimpin Islam pada waktu itu bukanlah negara yang berdasarkan Islam, tapi kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana Syarekat Islam (SI) sebagai salah satu organisasi Islam yang pertama, dalam programnya tidak menyebut negara Islam, tapi yang dituntut adalah kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi adanya persangkaan pada waktu itu bahwa jika Indonesia setelah merdeka akan otomatis menjadi negara Islam adalah keliru, karena pada waktu itu juga, muncullah organisasi-organisasi nasional yang tidak berdasar Islam (sekular). Pada akhirnya kemunculan partai/organisasi sekular ini menyadarkan pemimpin-pemimpin Islam bahwa kemerdekaan Indonesia kelak tidak secara otomatis akan membentuk negara yang berdasarkan Islam. Sejak saat itulah terjadi perdebatan antara golongan nasionalis Islam dan sekuler.⁸

Perdebatan-perdebatan tentang ideologi atau dasar negara Indonesia terjadi antara golongan nasionalis sekular dan golongan nasionalis Islam. Ketika sidang BPUPKI tahun 1945 di situ dibicarakan tentang dasar negara yang akan didirikan, adapun partai-partai Islam atau golongan nasionalis Islam pada waktu itu menghendaki terbentuknya sebuah negara Indonesia yang berasaskan Islam. Di samping adanya pimpinan-pimpinan dan alim ulama', yakni yang bergabung dalam partai-partai yang memilih jalan parlementer, juga terdapat pemimpin dan ulama' yang memilih jalan revolusioner dalam mencapai tujuan negara yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 234.

berdasarkan Islam. Diantara tokoh tersebut adalah S.M. Kartosoewirjo, sebuah nama yang cukup problematis dan kontroversial di negara Indonesia dari dulu hingga sekarang. Ia adalah seorang muslim yang taat beragama serta terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia sejak semula tidak menerima Republik Indonesia yang dibentuk tahun 1945. karena RI tidak secara resmi didasarkan pada Islam.¹⁰

Kartosoewirjo adalah seorang mujahid yang istiqōmah dalam memperjuangkan cita-cita politik Islam. Pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 7 Agustus S.M. Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di desa Malangbong, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Gerakan yang dikenal dengan Darul Islam ini meluaskan pengaruhnya hingga ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemimpin Darul Islam ini adalah seorang pemimpin pergerakan umat Islam yang semenjak zaman Hindia Belanda telah lama mencita-citakan berdirinya suatu negara Islam di Indonesia. S.M. Kartosoewirjo sejak awal telah mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Belanda dan berjuang tidak secara *kooperatif* dan tidak mau melalui parlemen atau partai politik yang pernah dimasukinya yaitu PSSI (Partai Sjarikat Islam Indonesia) maupun Masjumi.¹¹

Kartosoewirjo dengan ide Darul Islam-nya memberikan pandangan bahwa Islam tidak hanya agama tetapi juga merupakan ideologi politik, ideologi Islam

¹⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional*, hlm. 236.

¹¹ Al Chaidar, *Wacana Ideologi*, hlm. 50.

tidak hanya menuju keselamatan dunia saja, tetapi juga keselamatan akhirat.¹¹ Islam adalah agama yang sempurna yang memberikan aturan pada segala aspek, pendidikan, pengajaran baik lahir maupun batin, dari hal yang paling kecil (*Microcosmos*) Hingga hal yang paling besar (*Macrocosmos*) dari mengurus rumah tangga sampai mengendalikan pemerintahan.¹² Baginya Islam mempunyai konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah agama dan negara. Ia juga berpandangan bahwa untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi maka wajiblah ada kekuasaan yang bisa menjaminkannya, kekuasaan itu adalah kekuasaan Islam dan pemerintahan Islam. Sedangkan tidak ada pemerintahan Islam kecuali dalam sebuah negara Islam.¹³

Namun demikian, seiring dengan kekalahan kelompok nasionalis Islam oleh kelompok nasionalis sekuler dalam pentas politik nasional, gagasan tentang pemberlakuan syariat Islam di Indonesia menjadi semakin termarginalkan baik oleh rezim Orde Baru maupun Orde Lama, bahkan gagasan-gagasan tersebut seringkali menjadi momok yang sangat menakutkan. Kenyataan ini merupakan sesuatu yang ironi, karena terjadi dalam suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

¹¹ S.M. Kartosoewirjo, "Ideologi Islam dan Haluan Politik Islam" PP.Masyumi, 1946, dalam Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, SM. Kartosoewiryo; Fakta dan Sejarah Darul Islam* (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 541.

¹² S.M.Kartosoewirjo, "Broesoer Sikap Hijrah PSI.2". (Malangbong: Madjlis Tahkim Party Sjarikat Islam Indonesia, 1936), lihat Al Chaidar, *Pemikiran Politik*. hlm. 412.

¹³ S.M.Kartosoewirjo, "Sedikit Tentang Oelil Amri" dalam *Fadjar Asia*, 24 Mei 1930. Lihat Al Chaidar, *Pemikiran Politik*, hlm.515-516

Dari fakta-fakta yang telah disebutkan di atas itulah yang mendasari keinginan penyusun untuk mengadakan studi tentang konsep negara Islam menurut Kartosoewirjo.

B. Pokok Masalah.

Dari paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah studi ini adalah :

- 1) Bagaimana konsep S.M.Kartosoewirjo tentang negara Islam ?
- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran S.M. Kartosoewirjo sehingga mendirikan NII ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

a. Tujuan Penelitian.

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara akurat bagaimana konsep negara Islam menurut S.M.Kartosoewirjo.
2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran S.M.Kartosoewirjo sehingga dia mendirikan Negara Islam Indonesia

b. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi dunia akademik tentang bagaimana konsep negara Islam menurut S.M. Kartosoewirjo. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap upaya memahami gejala-gejala sosial dan politik umat Islam di tanah air sepanjang sejarahnya untuk selanjutnya mengambil pelajaran yang berharga

sehingga pada akhirnya nanti mampu untuk memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa buku yang meneliti tentang Kartosoewirjo, akan tetapi kebanyakan kajian yang ada pada buku-buku tersebut merupakan kajian analistis terhadap gerakan yang dilakukan S.M. Kartosoewirjo bukan tentang konsep negaranya tapi cenderung pada gerakan yang dilakukannya. Hal ini bisa kita lihat dari buku-buku yang telah ada, di antaranya adalah: *Pemikiran Politik Proklamator NII Kartosoewiryo karya Al Chaidar*,¹⁵ *Kartosoewiryo dan Darul Islam, Angan-angan Yang Gagal* yang di tulis oleh Holk Dengel.¹⁶ Di samping itu juga ada buku yang dikarang Pinardi yang berjudul *S.M. Kartosuwiryo*,¹⁷ juga karya Amak Syariffudin yang berjudul *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahkannya*.¹⁸

Dalam karyanya yang berjudul *Kartosuwiryo dan Darul Islam Angan-angan yang Gagal*, Dengel mengamati dengan secara obyektif tentang kedudukan Kartosoewirjo dalam pentas sejarah politik Indonesia. Dalam buku ini ada dua bagian penting, *pertama* adanya tulisan yang mendalam tentang biografi Kartosoewirjo. dan yang *kedua* membahas secara mendalam tentang Darul Islam.

¹⁵ AL Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo, Fakta dan Data Sejarah Darul Islam* (Jakarta: Darul Falah, 1999)

¹⁶ Holk H. Dengel, *Kartosuwiryo. dan Darul Islam. angan-angan yang gagal* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)

¹⁷ Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo* (Jakarta: Aryaguna, 1964)

¹⁸ Amak Syariffudin, *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahkannya* (Surabaya. Grip, 1962)

Demikian pula halnya Amak Syariffudin yang berjudul *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahnya* juga membahas tentang keseluruhan gerakan. Darul Islam di Indonesia.

Sedangkan Al Chaidar dalam bukunya memuat tentang kepribadian seorang mujahid yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, juga karya Pinardi secara panjang lebar mengupas tentang kehidupan Kartosoewirjo. lebih-lebih dimasa proklamasi NII. Adapun buku-buku di atas dipublikasikan setelah tumbangnya Orba. Selama Orba, buku-buku tersebut merupakan karya terpendam dan hanya menjadi hiasan pengarangnya sendiri, karena pada masa Orba tiap pemikiran yang merdeka dan kritis dibungkam dengan tuduhan makar.

Sejauh pengetahuan penulis dari hasil telaah pustaka ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas tentang pemikiran S.M. Kartosoewirjo tentang konsep negara.

E. Kerangka Teoritik

Kajian ini merupakan kajian *Fiqh Siyāsah* yaitu kajian tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernaftaskan ajaran Islam untuk mewujudkan kepentingan orang banyak. *Fiqh Siyāsah* merupakan keputusan politik. Keputusan itu antara lain berisi tentang siapa yang menjadi sumber kekuasaan, siapa pelaksananya, apa dasar dan bagaimana cara ia melaksanakan kekuasaan itu. dan

kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkannya.¹⁸ Dalam pemikiran politik Islam menurut H Munawir Sadzali paling tidak ada tiga paradigma hubungan agama dan negara yang mewarnai pemikiran para pakar Islam kontemporer.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat khalfah di masa awal perkembangannya.

Golongan kedua berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya Rasul-Rasul sebelumnya yang hanya bertugas mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia dan berpekerti baik. Nabi Muhammad menurut aliran ini tidak pernah bertugas atau bermaksud mendirikan suatu negara.

Sedangkan golongan ketiga tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang pokok saja, yang berupa sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan manusia.¹⁹

¹⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet I. hlm.365, artikel " Fikih Siyasi".

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm 1-2.

Dari ketiga model teori politik Islam tentang hubungan agama dan negara tersebut maka posisi S.M. Kartosoewirjo termasuk pada model yang pertama yaitu bersifat integralistik hal ini berdasar pada pandangannya bahwa Islam adalah agama kesempurnaan yang memberikan aturan terhadap segala aspek, pendidikan, pengajaran baik lahir maupun batin, dari hal yang paling kecil (*microcosmos*) hingga hal yang paling besar (*macrocosmos*) dari mengurus rumah tangga hingga mengendalikan pemerintahan.²¹

Jadi agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sebagaimana telah dipraktekkan Nabi Muhammad yaitu pada periode Madinah. Nabi telah menampilkan aktivitasnya tidak hanya di bidang risalah kenabian, tapi juga menonjol dibidang keduniaan untuk membangun kebutuhan spiritual dan material masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis penganut agama dan keyakinan yang berada di bawah kepemimpinannya. Nabi telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umatnya.²²

Secara eksplisit al-Qur'an memang tidak menyebut dan memerintahkan untuk menegakkan negara Islam, meski demikian prinsip-prinsip dan perintah moral mengisyaratkan tentang pentingnya penguasa. Allah SWT berfirman :

²¹ S.M.Kartosoewirjo, *Broesoer Sikap Hijrah PSII.2*. (Malangbong: Madjelis Tahkim Party Syarikat Islam Indonesia. 1936), lihat Al Chaidar, *Pemikiran Politik*, hlm. 412.

²² J.Suyuti Pulungan. *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cet 1 (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.101

يَأْيِهَ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ²²

Ayat tersebut memerintahkan agar mentaati Allah, Rasul, dan *Ulil Amri*. Dan tujuan dari pembuatan negara itu adalah untuk melaksanakan ketentuan Allah baik yang ada dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Berdasarkan hal ini tidak ada jalan lain untuk merumuskan tujuan dan cita-cita tersebut kecuali dengan adanya ketundukan dan ketaatan seluruh umat kepada kepala negara yang akan melaksanakan hukum dan ketentuan Allah dan Rasulnya.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasannya pemerintahan merupakan kewajiban agama yang paling besar. Bahkan tidak ada artinya penegakan agama dan dunia tanpa adanya parwalian (kekuasaan). Allah telah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar, yang mana tidak bisa berjalan kecuali dengan menggunakan kekuatan dan kepemimpinan. Kemaslahatan bani Adam tidak akan berjalan dengan sempurna kecuali dengan membentuk komunitas, karena sebagian mereka pasti membutuhkan sebagian yang lain. Dalam komunitas ini dibutuhkan seorang pemimpin.²³ Dalam hal ini Rasul bersabda,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ²⁴

Di sini Rasul mewajibkan salah seorang menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil dan bersifat mendadak. Hal ini menjadi isyarat akan pentingnya kepemimpinan lebih-lebih dalam perkumpulan yang lebih besar.

²² An-Nisa' (4) : 59.

²³ Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet V (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm 27

²⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyas al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, kitab jihad, Bab al-Qoum Yusāfiruna (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.) 11: 281. Hadis No. 2608. Hadis dari Ali Ibnu Bahr Ibn Barriy dari Hatim Ibn Ismail dari Muhamad Ibn Aslan dari Abu Sulaiman dari Abu Said Al-Qudri.

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب²⁶

Dari kaidah tersebut dapat di ketahui bahwa mendirikan negara adalah wajib hukumnya demi untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Adalah suatu hal yang kurang tepat bila ingin ditegakan prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non-Islami. Dari hal ini terlihat bahwa umat Islam membutuhkan sebuah negara dengan sistem yang Islami.

Realitas sejarah Islam juga menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah, hal ini dapat kita lihat misalnya sewaktu Nabi mulai menyiarkan agama Islam di Makkah beliau belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat lagi berdaulat. Umat Islam pada waktu itu masih lemah tidak sanggup menentang kaum Qurais dan akhirnya bersama sahabat hijrah ke Yatsrib, yang kemudian di kenal dengan Madinah. Di Madinah Nabi dan umat Islam mengalami perubahan besar, kalau di Makkah mereka tertindas, tapi setelah di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik, dan Nabi sendiri menjadi pemimpin dalam masyarakat yang baru di bentuk dan yang akhirnya merupakan suatu negara.

Pada masa *Khulafa' al-Rāsyidin* secara umum kebijaksanaan yang di tempuh sama dengan yang telah dilakukan Rasul karena memang nama *khālifāh* itu sendiri dimaksudkan sebagai pengganti Nabi dalam memelihara urusan agama dan dunia

²⁶ Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001). hlm. 133.

Setelah masa pasca khafifah empat yaitu masa Bani *Umayyah* jauh dari ajaran yang dipraktekkan Nabi. Pada masa ini tidak ada lagi bentuk musyawarah terutama dalam suksesi karena berubah menjadi sistem keturunan demikian juga sistem kenegaraan di masa *Abbasyiah*. Sehingga sistem dan bentuk pemerintahan pada masa ini disebut *monarki*.²⁷

Di masa kemunduran Islam Umat Islam malah hampir tidak mempunyai negara karena kebanyakan bangsa muslim ketika itu berada di bawah penjajahan Barat, tetapi keinginan untuk mendirikan negara sendiri tetap ada karena itu dalam sejarah dapat kita lihat di mana-mana umat Islam dalam periode selanjutnya memberontak untuk melepaskan diri dari penjajahan dan setelah mendapatkan kemerdekaan umat islam menghadapi masalah baru yaitu bagaimana sebenarnya konsep negara Islam itu.

F. Metode penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan bahan perpustakaan sebagai sumber utama, karena ini penelitian tokoh, maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh tersebut., pertama adalah penelitian pikiran dan keyakinan tokoh tersebut dan yang kedua adalah mengenai biografi tokoh tersebut.²⁸

²⁷ Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 112.

²⁸ Kati Hartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. XVII (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.33.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan sifat-sifat tokoh tersebut serta peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar tokoh tersebut yang mempengaruhi pemikirannya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dan mendukung penelitian, baik data-data yang ditulis oleh tokoh itu sendiri yang selanjutnya disebut data primer, data primer tersebut adalah *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewirjo; Fakta dan Sejarah Darul Islam* karya Al Chaidar,³⁰ yang mana sebagian besar isi buku tersebut merupakan lampiran dari tulisan-tulisan S.M. Kartosoewirjo sejak masa sebelum kemerdekaan sampai masa ia memproklamerkan dan memperjuangkan Negara Islam Indonesia. Selain data primer tersebut Juga terdapat data-data yang ditulis oleh orang lain yang menggambarkan pemikiran tokoh tersebut yang selanjutnya disebut data sekunder.

4. Analisa Data.

Setelah data terkumpul, maka dianalisa dengan menggunakan metode *kualitatif, analisis-deduktif*, yaitu kesimpulan yang ditarik dari data yang terkumpul yang di jadikan acuan dalam pemikiran kenegaraan tokoh tersebut.

5. Pendekatan

²⁹ Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 81.

³⁰ Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewirjo; Fakta dan Sejarah Darul Islam*, cet II (Jakarta: Darul Falah, 1999)

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *sosio-historis*. Yang dimaksud dengan *normatif* disini adalah suatu usaha untuk menjelaskan pendapat-pendapat tokoh tersebut manakala menelaah dari sisi hukum Islam (*fiqh*), hal ini penting untuk dilakukan karena konsep negara dalam Islam merupakan satu bagian dalam kajian hukum Islam khususnya *fiqh siyāsah*.

Adapun pendekatan *sosio-historis* dimaksud disini adalah bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan *sosio-kultural* dan *sosio-politik* yang mengitarinya.³¹ Dengan demikian, pengaruh sosial-politik terhadap pemikiran SM.Kartosewirjo juga ditelaah, sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikirannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan, disini akan dibagi menjadi lima bab yang memiliki korelasi dan kesinambungan antara satu dengan lainnya.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam Bab Kedua, Penyusun terlebih dahulu mendeskripsikan secara umum tentang negara. Sebagai pondasi dalam membahas sistem kenegaraan Islam di sini akan diuraikan tentang pengertian negara, kedudukan negara dalam Islam, tipologi negara dalam Islam dan prinsip-prinsip dasar negara dalam Islam

³¹ M.Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

Bab Ketiga, sebelum masuk pada pemikiran S.M. Kartosoewirjo tentang konsep negara, maka akan diuraikan dengan singkat lebih dahulu mengenai biografi SM. Kartosoewirjo, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang sosok yang menjadi obyek pembahasan ini. Di sini akan dibebaskan perihal pribadinya dan perjalanan hidupnya. Juga diungkapkan faktor kondisi sosial dan politik pada masa hidupnya yang sedikit banyak telah ikut mempengaruhi dan melatarbelakangi pemikirannya yang meliputi latar belakang sosial politik, setelah itu dipaparkan pemikiran kenegaraan tokoh tersebut.

Bab Ke empat, menganalisis pemikiran kenegaraan tokoh tersebut mengenai faktor-faktor yang mendorong S.M.Kartosoewirjo dalam memproklamerkan NII, pemikirannya tentang hubungan agama dan negara, bentuk negara serta sistem pemerintahan dalam Islam dan unsur-unsur negara

Bab Kelima merupakan kesimpulan dari semua yang telah dipaparkan di atas, dengan disertai saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang konsep negara Islam Indonesia menurut S.M. Kartosoewirjo, kiranya dapat ditarik kesimpulan penting yang berkaitan dengan pokok masalah dalam skripsi ini antara lain adalah:

1. Negara Islam dalam gambaran S.M. Kartosoewirjo adalah suatu negara yang semata-mata bersendikan kepada perintah-perintah Allah yang termasuk didalamnya hadis-hadis yang shahih dan undang-undang serta peraturan – peraturan negara yang dikeluarkan oleh Ulil Amri Islam. Menurutnya suatu negara Islam harus memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh secara *de facto* maupun *de jure*. *Teodemokrasi* adalah bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal menurut S.M. Kartosoewirjo. Dalam merealisasikan ide negara Islamnya kartosoewiryo agaknya tidak bisa menemukan strategi yang ideal, dikarenakan sifatnya yang radikal, formalis dan tidak realistis bahkan cenderung anarkhis, sehingga tujuan negara Islam Indonesia sebagai karunia Illahi di bumi hilang karena tidak dilaksanakan dengan damai.
2. Menilik latar belakang S.M. Kartosoewirjo dalam mendirikan NII, ada dua faktor yang melatar-belakanginya dalam memproklamerkan NII yaitu faktor intern dan ekstern. faktor intern tersebut adalah bahwa ide NII merupakan cerminan dari keyakinan beliau terhadap ajaran-ajaran Islam atau merupakan cita-cita yang diilhami ajaran-ajaran Islam, selain itu juga merupakan sikap

komitmen dan semangatnya yang tinggi untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, serta bentuk ijtihad dari apa yang telah ia pelajari dan warisi tentang agama Islam dari para gurunya yang menganjurkan negara Islam. yang membentuk kepribadiannya menjadi mujahid yang istiqomah. Selain itu juga ambisinya yang ingin menjadi pemimpin. Faktor ekstern tersebut diantaranya adalah pencoretan naskah Piagam Jakarta, dalam pembukaan UUD tanggal 18 Agustus 1945, adanya perjanjian Renville (1948), yang berakibat hijrahnya kekuatan militer (TNI) ke Yogyakarta yang waktu itu menjadi Ibu Kota negara.

B. Saran-Saran

Persoalan kenegaraan dalam Islam merupakan persoalan ijtihadi yang muncul sejak wafatnya Nabi Muhammad sampai zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Hal ini memberikan indikasi bahwa persoalan kenegaraan selalu terbuka untuk berkembang.

Pandangan S.M. Kartosoewirjo di atas merupakan cerminan dari keyakinan beliau terhadap ajaran-ajaran Islam, juga merupakan sikap komitmen dan semangatnya yang tinggi untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, komitmen dan semangatnya yang kuat ini tentu saja harus didukung dan dijadikan sebagai panutan, karena sebagai muslim, memang seharusnya melaksanakan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu, penyusun akan sangat senang bila ada penelitian yang lebih lanjut tentang pemikiran S.M. Kartosoewirjo, walaupun tokoh tersebut dikucilkan dalam sejarah bangsa Indonesia, tetapi bagaimanapun juga beliau telah ikut memberikan kontribusi bagi kemerdekaan dan pemikiran kenegaraan bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Hadits.

Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, alih bahasa Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.

Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, diedit oleh Harun al-Barbasy, Yogyakarta: Pustaka Iqra', 2001.

....., *Piagam Nabi Muhammad: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fachruddin, Fuad M., *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.

Khalāf, 'Abd al-Wahab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fiqr, 1978.

Khan, Qamaruddīn, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.

Mubāarak, Muhammad al-, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Firman Harianto, Jakarta: C.V. Pustaka Mantiq, 1995.

Mūsa, M. Yūsuf, *Politik dan Negara Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlās, 1990.

Musbikin, Imam, *Qawa'id Al Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Pulungan, J.Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1994.

Qarḍawi, Yūsuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafri Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997.

- _____, *Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Katu suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Rāziq, 'Ali 'Abd ar-, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan, Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa M.Zaid Su'udi, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Razak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Imam -Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at Islam Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI. Press.1990.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyāsah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, alih bahasa Rafi' Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Widodo, L.Amin, *Fiqih Siyāsah: Dalam sistem Kenegaraan dan Pemerintah*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994.

D. Kelompok Buku Lain.

- Binder, Leonard, *Islam Liberal, Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, alih bahasa Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewiryo: Fakta dan Sejarah Darul Islam*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- _____, *Wacana Ideologi Negara Islam, Studi Harakah dan Moro National Liberation Front*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- _____, *Sepak Terjang KW9 Abu Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca. S.M Kartosoewirjo*, Jakarta: Madani Press, 2000.
- Amīn, Ahmad, *Fajar Islam*, Mesir: Maktabah al-Nazah al-Misriyyah, 1964.
- Anonim, *Bunga Rampai Syari'at Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
- Azra', Azyumardi, *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana Kekuasaan*, Bandung: Rosda Karya, 1999.

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1999 .
- Dengel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosoewiryo, Angan-Angan Yang Gagal*. Jakarta: Sinar harapan. 1995.
- Hamim, Toha, *Paham Keagamaan kaum reformis*, alih bahasa Imron Rosyadi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Hartono, Kartini, *Pengantar metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Husain, Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Ma'arif, Ahmad Syafii, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Study Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES 1985.
- Magnis, Suseno Frans, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Mudzhar, M.Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nasution, Dr.Harun, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Noor, Deliar, *Pemikiran Politik Negara Barat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Syarifuddin, Amak, *Kartosoewirjo dan Menyerahnya*, Surabaya: Grip 1962.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* , Jakarta: Logos, 2000.

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi.

- Dahlan, Abdul Aziz dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

F. Kelompok Makalah.

Abdillah, Masykuri, "Reorientasi Pembelajaran Fiqh Siyasah Menuju Artikulasi Hukum dan Politik Kontemporer" Makalah Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme konstitusi dan Kekuasaan Sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, diselenggarakan oleh HMJ PMH dan Muammalat Fakkultas Syaria'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23 September 1999.

G. Kelompok Majalah

Abdillah, Masykuri, "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Prespektif Sejarah dan Demokrasi Modern", *Tashwirul Afkar*, No. 7 2000, hal 102.

M.D, Moh. Mahfud., "Hukum Islam Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional. ". *Al-Mawarid*, Edisi VI, Desember 1997.

Minhaji, Ahmad, "Supremasi Hukum dalam Masyarakat Madani Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam ", *UNISIA, NO. 41/XXII/IV*, 2000.

Syamsudin, M.Din , "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam". *Ulumul Qur'an* (No.2.vol.IV.1993).

Sayyid Aqil Husain al-Munawwar, "Fiqh Siyasah dalm kontek perubahan menuju Masyarakat Madani", *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, vol.I, no.1, 1999,

H. Kelompok Lain.

"Memahami Kembali Sejarah Darul Islam di Indonesia," [http://members .tripod.com/darul islam/](http://members.tripod.com/darul_islam/), akses 24 Januari 2004.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm.	F.N.	Terjemahan
			BAB I
1	13	23	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu.
2	13	25	Apabila tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah salah satu menjadi pemimpin di antara mereka
3	14	26	Sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib.
			BAB II
4	37	46	Dan hendaklah kamu memutuskan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu.
5	37	47	Sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib.
6	60	92	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
7	60	93	Aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu.
8	60	94	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kamu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan.
9	61	96	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

			Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
10	62	97	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.
11	62	98	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
12	62	93	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.
			BAB III
13	84	49	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
14	84	50	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu.
15	85	52	Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah.
			BAB IV
16	104	2	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.
17	104	4	Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh memadharatkan orang lain.
18	115	30	Sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib

19	120	36	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II.

BIOGRAFI ULAMA'

A. Munawir Sjadzali.

Lahir di Klaten 7 November 1925. Setelah menamatkan SMP Mambaul Ulum Solo, ia menjadi guru di Ungaran, Semarang. Ia meniti karier di Departemen Luar Negeri sejak 1950 di Texas, kemudian di Washington DC (1956-1959), Kolombo (1963-1968), wakil kepala perwakilan RI di London (1971-1974), Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar, dan perserikatan Keamiran Arab (1976-1980).

Di dalam negeri karirnya dimulai pada Kabag Amerika Utara (1959-1963), Kabiro Tata Usaha Pimpinan Deplu dan Dirjen Politik Deplu sejak 1980. Sementara pendidikannya pada University of Exeter, Inggris (1931-1954), dan Masternya diperoleh pada Georgetown University, Washington DC, AS. Ia adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat, pernah menjadi Menteri Agama selama dua periode (1983-1988, 1988-1993)

B. Ahmad Syafi'i Ma'arif.

Lahir tanggal 31 Mei 1935 di Sumpurkudus Sumatera Barat, ia pernah belajar di Madrasah Mu'allimin Yogyakarta (1956), FKIP Universitas Cokroaminoto sampai sarjana muda (1964). Kemudian tamat di FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah pada Northern Illinois University (1973) dan memperoleh gelar M.A. dalam ilmu sejarah pada Ohio University Amerika Serikat (1980). Mendapat Gelar Ph.D. dalam bidang pemikiran Islam diperolehnya dari the University of Chicago, Amerika Serikat.

Ia adalah dosen FPIPS IKIP, IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ia sering menulis dalam jurnal, majalah dan surat kabar, buku yang ditulisnya di antaranya adalah "Islam dan Masalah Kenegaraan".

C. Al Mawardi.

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habīb al-Basri. Beliau lahir di Basrah 364 H dan meninggal dalam usia 86 tahun pada tahun 450 H. ia hidup pada era Bani Abbasyiah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni Al-Qādir Billāh dan al-Qōimu Billāh, ia belajar fiqh, ushul fiqh dan tafsir, dan beliau merupakan penganut madzhab Syafi'i.

Banyak sekali buku yang telah ditulisnya baik dalam bidang fiqh, politik, tafsir dan sastra. Di antara karyanya yang terkenal dalam bidang politik adalah "al-Ahkām as-Ṣulṭōniyah".

D. Qamaruddin Khan.

Lahir pada tahun 1916 di Banaras, India. Ia memperoleh gelar kesarjanaan dalam bahasa Arab dan teologi dari universitas Islam Aligarh tahun 1946. kemudian ia diangkat menjadi tenaga pengajar pada universitas yang sama. Sesudah pemisahan India dan Pakistan, ia pindah ke Pakistan, kemudian ia memperoleh gelar M.A. (sejarah Islam) dari Universitas Karachi.

Karir pendidikannya sangat cemerlang, sehingga ia memperoleh tempat terhormat di Urdu College, Karachi, Institut Riset Islam Islamabad, dan Universitas Punjab, Lahore. Di antara salah satu karyanya adalah "Pemikiran politik Ibnu Taimiyah".

E. Imam Ghazali.

Nama lengkapnya adalah Abu Hamīd al-Gazālī, seorang teolog terkemuka, ahli hukum, ahli tasawuf terkenal dan ia mendapatkan julukan Hujjah al Islam. Ghazali dilahirkan di kota Thus, Khurasan, pada tahun 450 H atau 1058 M. dan wafat juga di Thus pada tahun 508 H atau 1111 M.

Dia mendapatkan pendidikan awalnya di Thus, di bawah asuhan seorang pendidik yang ahli tasawuf. Kemudian ia pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam pada Imam Haramain Juwaini. Pada tahun 484 H atau 1091 M. Ghazali ditugaskan oleh Nizām al-Mulk untuk mengajar di lembaga pendidikan tinggi Nizhamiyah di Baghdad. Umat Islam di Indonesia mengenalnya terutama melalui karya-karya tulisannya di antaranya adalah "Ihya' 'Ulūm al-Dīn".

F. Maududi.

Nama lengkap pemikir besar Islam kontemporer ini adalah Abu al-A'la al-Maududi. Dia dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, India Tengah, dia wafat pada tanggal 23 September 1979 di rumah sakit di New York.

Semasa kecilnya Maududi belajar di rumah, diajar dan dididik oleh ayahnya sendiri, seorang pengikut sufi yang meninggalkan profesinya sebagai pengacara. Baru setelah mencapai usia sebelas tahun Maududi mengikuti ujian masuk ke sekolah lanjutan. Di terkenal dengan seorang yang cerdas dan menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya dengan mendapat ijazah *Maulawi*.

CURICULUM VITAE

Nama : Khozin
Tempat / Tanggal Lahir : Lampung-Tengah, 02 Mei 1979
Nim : 99373883
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siayasah
Alamat Asal : Rt.07, Rw.01, Gayau-Sakti, Seputih-Agung, Bandar-Jaya,
Lampung Tengah.
Alamat Kost : PP. Wahid Hasyim, Gatun, Condong Catur, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Orang Tua :

Ayah : Suryan
Ibu : Wagirah
Alamat : Rt.07, Rw.01, Gayau-Sakti, Seputih-Agung, Bandar-Jaya,
Lampung-Tengah.

Riwayat Pendidikan :

1. SDN. III Gayau-Sakti (1986-1992)
2. MTs Darussalam Gayau-Sakti (1992-1995)
3. MAS Al-Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo, Jawa-Timur (1995-1999)
4. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2004)

Pengalaman Organisasi :

1. Departemen Pendidikan OPMI Al-Islam (1997-1998)
2. Kabag Lembaga Sarana Prasarana Pondok Pesantren Wahid Hasyim
Yogyakarta (2001-2002)

3. Korwil Lembaga Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (2000-2002)
4. Staf Pelatih Bola Volly IMMIG, CC, Depok, Sleman (1990-1994)
5. Bendahara OSWAH Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (2002-sekarang)
6. Staf Pengajar Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (2002-sekarang)
7. Staf Pelatih Pencak Silat MTs Wahid Hasyim Yogyakarta (2002-sekarang)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA